

Aktor Pemilu

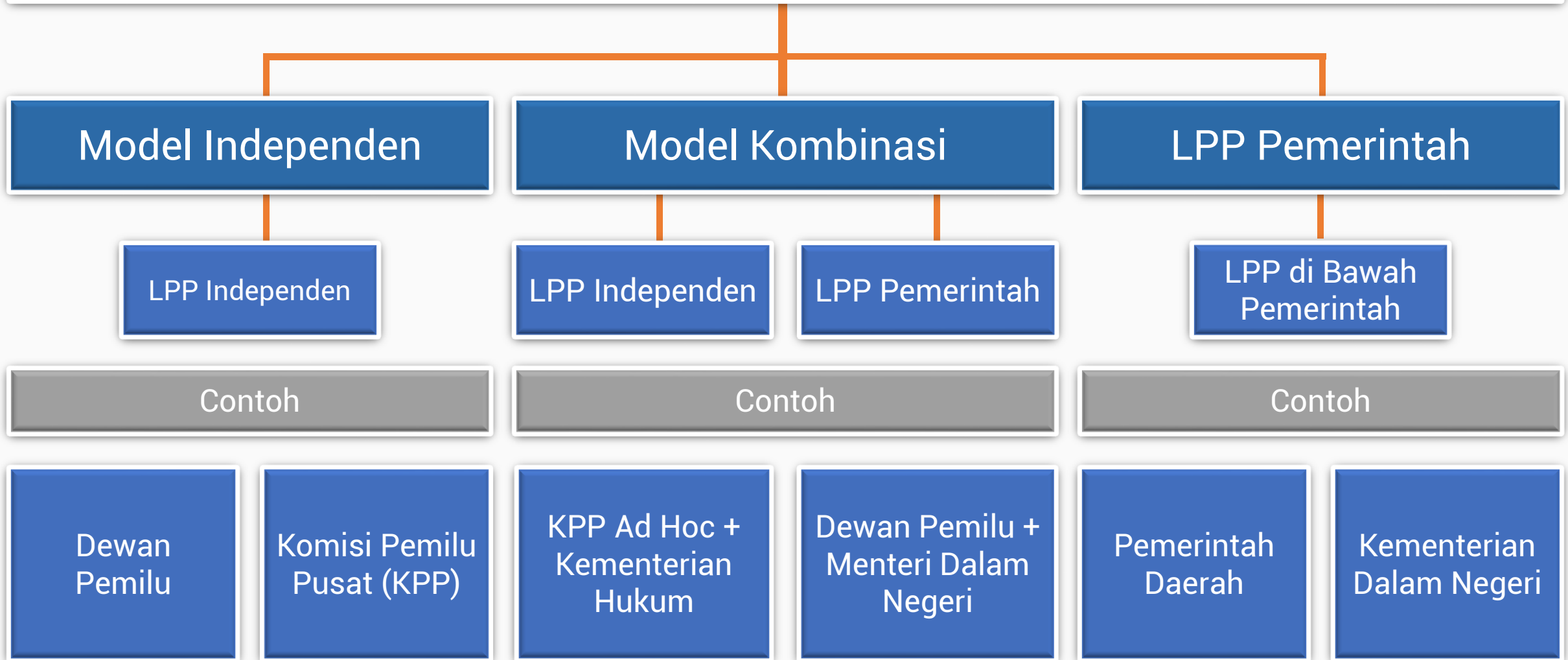
Penyelenggara (1) *Komisi Pemilihan Umum*

Rabu, 22 April 2020, Pukul 11.00-12.30 WIB

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem
Khoirunnisa Agustyati, Peneliti Perludem



TIGA MODEL PENYELENGGARA PEMILU



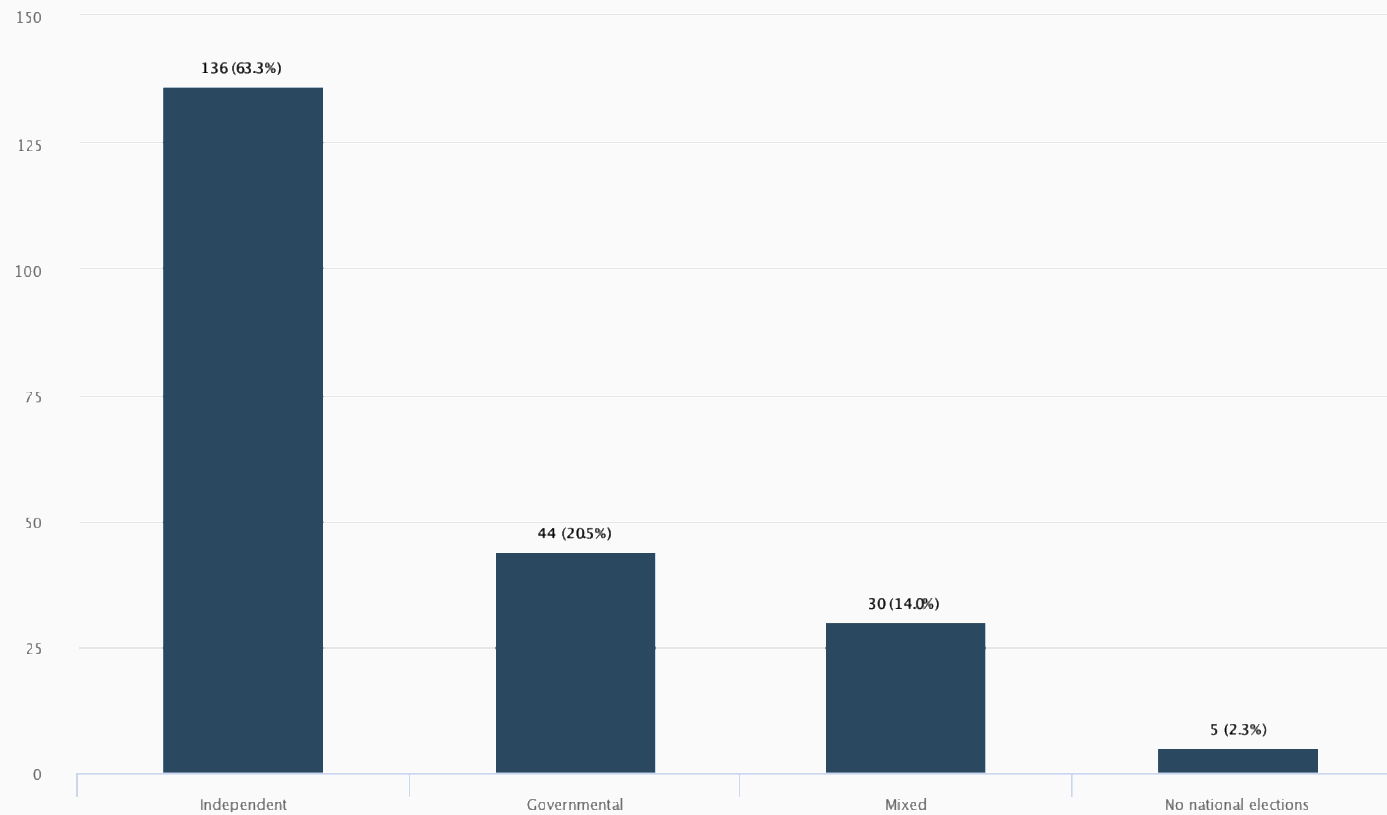
MODEL PENYELENGGARA PEMILU

Model of electoral management

Worldwide

Electoral Management Design Database

Data for 215 countries



Sumber: <https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout>



PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Independensi

Imparsialitas

Integritas

Transparansi

Efisiensi

Profesionalisme

Pelayanan



Siklus Pemilu



Sumber: The International IDEA

FUNGSI KPU

Fungsi Personalia

Fungsi Keuangan

Fungsi Hukum

Fungsi Investigasi

Fungsi Logistik dan
Operasional

Fungsi Pengolahan Data

Fungsi Informasi dan
Publikasi



PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA (1)

Tahun Pemilu	Undang-Undang	Jenis Pemilihan	Unsur Penyelenggara
1946	UU No 12/1946	Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat	
1955	Keputusan Presiden No 188/1953 kemudian UU No 7/1953	Kepres mengenai Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan Pemilu 1955. Pemilu 1955 untuk memilih Anggota Konsituante dan Anggota DPR	Partai Politik
1971	UU No 15/1969	Anggota DPR	Pemerintah.
1982-1997	UU No 2/1980	Anggota DPR	Pemerintah
1999	UU No 3/1999 dan UU No 4/1999	Anggota DPR dan DPRD	Kombinasi antara pemerintah (5) dan partai politik (48)
2004	UU No 12/2003	Pemilu presiden, pemilu legislatif, pilkada	Mixed (komisioner nonpartisan, sekretariat di kemendagri)
2009	UU 22/2007	Pemilu presiden, pemilu legislatif, pilkada	Independen
2014	UU 15/2011	Pemilu presiden, pemilu legislatif, pilkada	Independen
2019	UU 7/2017	Pemilu presiden, pemilu legislatif, pilkada	Independen

PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA (2)

Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”



WAKTU REKRUTMEN KPU KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA

Waktu rekrutmen KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota perlu mengikuti jadwal penyelenggaraan pemilu



TIM SELEKSI KPU/KPU PROV/KPU KAB/KOTA

- ✓ Memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik
- ✓ Memiliki kredibilitas dan integritas
- ✓ Memahami permasalahan pemilu
- ✓ Memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen seleksi
- ✓ Tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu



**HIERARKI
PENYELENGGARA
PEMILU**



KPU

KPU Provinsi

KPU Kab/Kota

PPK

PPS

KPPS

Tata Kelola KPU dan Sekretariat (1)

Anggota KPU :

- ✓ Membuat Kebijakan secara kolektif kolegial.
- ✓ Bertanggung jawab atas Divisi tertentu .
- ✓ Menjadi Koordinator Wilayah tertentu.
- ✓ Memimpin Kelompok Kerja tertentu.

Ketua merangkap Anggota KPU:

- ✓ Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU.
- ✓ Bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam.
- ✓ Mengkoordinir divisi dan korwil.
- ✓ Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil.
- ✓ Memfasilitasi knowledge sharing antar divisi.

Sekretariat KPU :

- ✓ Pelaksana kebijakan.
- ✓ Unit pendukung teknis, administrasi & pelayanan.



TATA KELOLA KPU DAN SEKRETARIAT (2)



Sekretariat Jenderal KPU RI:

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab secara administratif dan fungsional kepada Ketua KPU RI



Sekretariat KPU Provinsi :

Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Provinsi dan secara administratif kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.



Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi.

Tanggung jawab fungsional, antara lain terkait dengan pelaksanaan program dan tahapan Pemilu.

Tanggung jawab administratif, antara lain terkait dengan anggaran dan kepegawaian.



AFIRMASI DALAM PENYELENGGARA PEMILU

UNDANG-UNDANG	KETENTUAN AFIRMASI DI TIM SELEKSI PENYELENGGARA PEMILU	KETENTUAN AFIRMASI DI KOMPOSISI ANGGOTA PENYELENGGARA PEMILU
UU 3/1999	Tidak diatur	Tidak diatur
UU 3/2003	Tidak diatur	Tidak diatur
UU 22/2007	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none">- Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK;- Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu.
UU 15/2011	Keanggotaan tim seleksi memperhatikan 30% keterwakilan perempuan	<ul style="list-style-type: none">- Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK;- Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu.
UU 7/2017	Keanggotaan tim seleksi memperhatikan 30% keterwakilan perempuan	<ul style="list-style-type: none">- Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK;- Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu.

TAHAPAN SELEKSI KPU/ KPU PROVINSI/KPU KAB/KOTA

Mengumumkan Pendaftaran	Tim Seleksi Mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada media massa lokal
Menerima Pendaftaran	Masa Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 hari
Melakukan Penelitian Administrasi	Penelitian Administrasi dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap Pendidikan, Publikasi terkait pemilu, organisasi/institusi kepemiluan, organisasi non kepemiluan
Tes Tertulis	Tes tertulis dilaksanakan dengan metode CAT yang disiapkan oleh KPU



KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KPU

Dasar Hukum	Jenis Kelamin		JUMLAH (orang)
	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	
UU 15/2011	13	2	15
UU 7/2017	138	35	173
Total	151	37	188



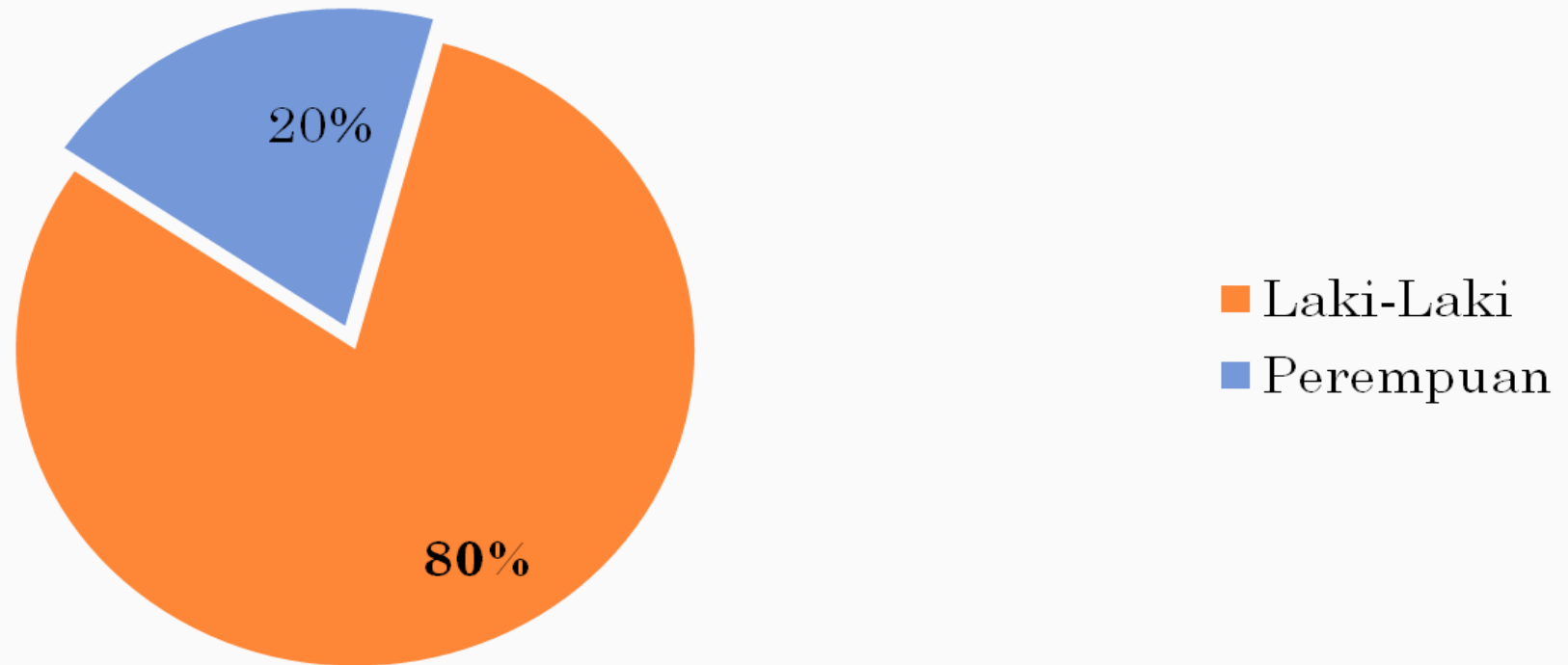
KPU Provinsi yang tidak memiliki anggota KPU perempuan :
Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Riau, dan Nusa Tenggara Timur.

KPU Provinsi dengan jumlah anggota KPU perempuan terbanyak :
DKI Jakarta (3 orang dari 7 anggota KPU Provinsi), Sulawesi Selatan (3 orang dari 7 anggota KPU Provinsi).

Ketua KPU Provinsi perempuan :
DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

INFOGRAFIK ANGGOTA KPU PROVINSI

Data Prosentase Anggota KPU Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin



DATA EXISTING ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN (PER 8 APRIL 2019)

Dasar Hukum	Jenis Kelamin		JUMLAH (orang)
	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	
UU 15/2011	291	49	340
UU 7/2017	1.733	387	2120
UUPA	92	13	105
Total	2118	447	2.565

Ket: KIP Kab Simeulue belum dilantik



INFOGRAFIK ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA (PER 8 APRIL 2019)

Data Anggota KPU Kabupaten/Kota
Berdasarkan jenis kelamin

